

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan organisasi atau perusahaan akan terjadi semakin pesat pada berbagai bidang. Salah satunya perkembangan dalam bidang jasa kesehatan yang ditandai dengan semakin banyaknya rumah sakit umum negeri maupun swasta yang menawarkan berbagai jasa kesehatan. Rumah sakit umum merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bersifat mendasar dan spesifikasi. Setiap rumah sakit bersaing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat spesifikasi. Rumah sakit Menjadi fasilitas penyedia layanan masyarakat atau pasien, termasuk didalamnya pemberian obat-obatan sesuai dengan penyakit yang dialami oleh pasien serta pula memberikan resep dari dokter. Dalam kenyataannya, ketersediaan obat-obatan pada rumah sakit menjadi sangat krusial dikarenakan sering dianggap sebagai aset lancar yang jumlahnya signifikan secara material (Sari, 2013).

Rumah sakit menjadi bagian dalam jaringan pelayanan masyarakat dibidang keseharan yang memiliki tuntutan untuk memperlihatkan kinerjanya dengan baik. Rumah sakit senantiasa dihadapkan pada tuntutan untuk mampu bertahan dalam menghadapi krisis global yang berdampak di hampir keseluruhan sektor perekonomian. Pengelolaan rumah sakit yang transparan, mandiri, akuntabel, dan bertanggung jawab dapat memberikan gambaran tentang bagaimana rumah sakit menjalankan pengelolaannya sehingga visi serta misi yang ada dapat tercapai secara optimal. Menurut Natasya (2017), hal ini dapat diakibatkan oleh ketidaktepatan instrumen

organisasi dalam menciptakan pengelolaan yang memadai dan belum terbangunnya komitmen yang tinggi dari pihak pengelola rumah sakit tersebut. Instrumen yang belum memadai tersebut menimbulkan berbagai penyimpangan, penyelewengan, penyelundupan, dan korupsi.

Fenomena *fraud* di rumah sakit merupakan sesuatu yang sering terjadi. Terjadinya kecurangan, penipuan, dan penggelapan yang dilakukan di institusi publik maupun swasta, mulai dari yang sederhana hingga yang sangat canggih dan rumit. Kondisi ini seharusnya memicu kesadaran semua pihak untuk membangun komitmen terhadap penerapan tata kelola yang baik dan konsisten, yang meluas ke seluruh lapisan.

Sekitar tahun 2019, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memvonis tiga dokter yang terkait dengan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) yang dilakukan secara berjamaah. Pelaksanaan sidang tersebut terjadi secara terpisah dan menghasilkan vonis yang beragam. Tiga dokter yang dinyatakan bersalah yakni Kuswan Ambar Pamungkas, Masrial, dan Wlli Zulfikar, dimana semuanya merupakan dokter dari RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Arifin Ahmad Pekanbaru. Berdasarkan usutan, mereka terbukti melakukan tindakan korupsi dan merugikan negara sejumlah Rp1,5 miliar (<http://news.detik.com>, 2019).

Kasus serupa juga terjadi di Banda Aceh pada tahun 2017 di Rumah Sakit berbentuk Yayasan. Menurut detiknews.com (2017) bahwa mantan direktur Rumah Sakit Fakinah Banda Aceh, M. Saleh Suratno ditangkap pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Saleh dimasukkan ke penjara setelah Mahkamah Agung (MA) memberikan vonis dua tahun penjara. Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Erwin Desman, mengatakan Saleh bersalah karena menggelapkan uang

Yayasan Rumah Sakit Fakinah sebesar Rp13 miliar. Saleh menggunakan uang Yayasan untuk keperluan pribadi.

Berdasarkan penjabaran di atas korupsi merupakan salah satu bentuk kecendrungan kecurangan akuntansi. Menurut kajian ICW (Indonesia Corruption Watch) pada periode 2010-2016, terdapat sejumlah 219 kasus korupsi pada sektor kesehatan yang melibatkan 519 tersangka. Dari total jumlah kasus yang ada, Negara telah mengalami kerugian hingga sekitar Rp890,1 miliar (<http://m.cnnindonesia.com>, 2016). Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan *fraud* adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari pengaruh lingkungan kerja individu tersebut. Dalam meminimalisasi tidak kecurangan perlu adanya sistem pengendalian internal yang efektif. Kondisi tersebut didukung atas hasil penelitian Antarwijaya & Purnomo (2017), Kusuma & Andrina (2017), serta Junaidi & Ubaidillah (2018). Dalam penelitian mereka, ditemukan fakta dimana semakin efektif pengendalian internal yang diterapkan maka semakin rendah peluang adanya kecurangan yang ada. Menurut Hermiyetti (2010) pengendalian internal adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh dewan komisaris melaksanakan proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bagi realisasi pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan tujuan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Pengendalian internal merupakan bentuk dalam pengaruh beberapa pihak misalnya manajemen, dewan direksi, dan personil lainnya dalam entitas yang dirancang untuk secara memadai meyakinkan terkait pencapaian tujuan yang berkaitan dengan pelaporan, operasi, dan kepatuhan (Romney & Steinbart, 2016).

Dalam mengembangkan suatu sistem pengendalian internal, dibutuhkan suatu acuan berupa kerangka pengendalian internal atau model yang baik. Salah satunya dengan menggunakan kerangka pengendalian internal yang telah banyak diterapkan, misalnya kerangka COSO. Menurut Gondodiyoto (2007), kerangka COSO mampu digunakan sebagai dasar pengevaluasian serta pengembangan kendali internal karena bersifat umum. Menurut Romney & Steinbert (2016) pada unsur pengendalian internal COSO terdapat lima komponen dan prinsip model yaitu control lingkungan, penilaian resiko, aktivitas kontrol, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Kelima komponen dan prinsip pengendalian internal dalam kerangka COSO nyatanya memiliki peran krusial dalam membantu manajemen mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi, serta mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan. Selain itu, pengendalian internal juga dapat membantu auditor dalam melakukan audit yang efektif. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan pengendalian internal yang baik merupakan suatu hal yang penting bagi suatu entitas untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Irdawati, 2018).

Salah satu kecurangan yang diminimalisir oleh pengendalian internal adalah pengadaan barang dan jasa, terutama pengadaan obat-obatan pada rumah sakit. Hal ini dikarenakan ketersediaan obat-obatan di dalam suatu rumah sakit merupakan hal krusial dimana tergolong menjadi komponen aset lancar yang jumlahnya cukup material dalam kehidupan (Sari, 2013).

Obat menjadi komponen utama yang memiliki kebutuhan tinggi dalam aktivitas rumah sakit. Pemeriksaan serta pemberian obat anjuran dokter diperlukan pasien untuk membantu penyembuhan penyakit yang diderita. Ketika pasien telah mendapat resep, maka bagian farmasi akan memberikan obat sesuai resep. Untuk itu, terjadilah proses mutasi berbagai obat dari pihak farmasi ke pasien, dimana dalam prosesnya membutuhkan standar prosedur tertentu.

Hal ini berlaku pula dalam proses pembelian pengadaan obat yang memiliki frekuensi persediaan sedikit atau bahkan telah habis. Dengan kata lain, dalam suatu rumah sakit diperlukan pengawasan yang ketat dan prosedur yang terstruktur untuk memantau keluar masuknya persediaan obat-obatan, baik dalam hal pembelian dan pengadaan maupun dalam hal distribusi obat-obatan dari bagian farmasi ke pasien. Keseluruhan unsur yang ada dalam proses pengelolaan logistik suatu rumah sakit perlu dijalankan secara serasi, selaras, serta seimbang. (Sari, 2013).

Prosedur pencatatan, pengarsipan, dan penugasan perlu dilakukan secara lengkap dan benar dalam alur keluar maupun masuknya obat, sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Dengan menjalankan prosedur tersebut, organisasi dapat memperoleh informasi yang akurat terkait aktivitas mutasi persediaan dari obat-obatan yang ada, dimana hal ini sangat bermanfaat bagi organisasi untuk memantau persediaan obat-obatan mereka (Sari, 2013).

Rumah Sakit Aisyiyah merupakan salah satu rumah sakit swasta yang ada di Pariaman. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di instalasi farmasi rumah sakit Aisyiyah bahwasannya sering menghadapi permasalahan khususnya terkait catatan saldo akhir dari persediaan beberapa obat yang mana hasilnya menunjukkan ketidakseimbangan adanya barang di gudang dengan saldo akhir dari laporan persediaan oleh administrasi instalasi dari pihak farmasi rumah sakit Aisyiyah. Hal ini terjadi karena pengendalian pada kartu stock obat-obatan di

instalasi farmasi rumah sakit aisyiyah tidak berjalan secara maksimal. Padahal semua prosedur telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan pihak rumah sakit tersebut.

Permasalahan lainnya terjadi pada rumah sakit Aisyiyah terletak di persediaan obat kadaluarsa (*expired date*). Hal tersebut berpotensi merugikan pihak farmasi rumah sakit aisyiyah. Pengendalian intern dibutuhkan dalam pengendalian permasalahan yang terjadi. Tujuan dari pengendalian intern persediaan adalah untuk melindungi aset perusahaan dari kerusakan dan pencurian. Kerusakan atau pemasukan yang tidak tepat, serta kesalahan dalam mencatat permintaan dan pengeluaran barang dapat menyebabkan catatan persediaan tidak sesuai dengan persediaan yang sebenarnya di gudang. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan persediaan secara periodik untuk memastikan keakuratan catatan persediaan dan mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan. Sistem dan prosedur yang baik dapat membantu meminimalisir kesalahan atau penyimpangan dalam kegiatan atau transaksi. pada saat menjalankan aktivitasnya sering terjadi kehabisan stock jenis obatan sehingga menghambat kelancaran dalam penyelenggaraan pelayanan pada apotik dikarenakan kesalahan dalam pembelian stock obat- obatan yang sudah di bawah tetapi tidak diadakan pembelian yang disebabkan kurang akuratnya laporan persediaan yang tersedia (Sari, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa hal ini terjadi karena dokter di rumah sakit tersebut berhenti meresepkan obat, Disamping itu rumah sakit ini terjadi kekeliruan yaitu tidak sesuainya permintaan obat-obatan dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan

(DPJP) dengan obat-obatan yang ada rumah sakit. Permasalahan yang paling rentan terjadi pada proses keluar masuknya obat di instalasi farmasi rumah sakit aisyiyah. Barang yang keluar dari gudang persediaan sering terjadi kekeliruan pada pencatatan barang di kartu stock obatnya, sehingga jumlah fisik tidak sesuai dengan kartu stock. Pemasukan yang tidak benar, lalai untuk mencatat permintaan, barang yang dikeluarkan tidak sesuai pesanan, dan semua kemungkinan lainnya dapat menyebabkan catatan persediaan berbeda dengan persediaan yang sebenarnya ada di gudang (Sari, 2013).

Pengelolaan persediaan obat-obatan menjadi komponen krusial dari pengelolaan kegiatan operasional rumah sakit. Secara medis, obat adalah benda yang digunakan untuk merawat penyakit, meredakan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Oleh karena itu, obat merupakan faktor pendukung dalam kesembuhan pasien dan harus tersedia di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pasien dan masyarakat umum. Pengelolaan persediaan obat diperlukan karena obat memiliki beberapa kekhususan yang membedakannya dari persediaan lainnya. Pertama, obat memiliki umur terbatas dan mudah rusak. Kedua, jumlah dan waktu pemberian obat tidak bisa diramalkan karena bergantung pada banyaknya penyakit yang muncul yang tidak bisa diprediksi. Pengelolaan obat dalam suatu instalasi farmasi merupakan hal krusial yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan (Sari, 2013).

Pengelolaan terkait ketersediaan obat memerlukan penerapan fungsi manajemen oleh pihak manajemen. Manajemen ini tidak bisa dipisahkan dari fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan menjadi dasar dari fungsi-fungsi lainnya dalam pengelolaan persediaan obat-obatan. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, manajemen memerlukan informasi yang komprehensif mengenai kegiatan pengelolaan persediaan obat-obatan agar dapat menjamin bahwa kebijakan manajemen telah dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, rumah sakit dapat menghindari masalah dan melakukan perbaikan secara cepat dan tepat. Manajemen melalui aktivitasnya yaitu memberikan tanda yang jelas kepada pegawai tentang pentingnya pengendalian, Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu perusahaan harus dilakukan (Sari, 2013).

Oleh karena itu, instalasi farmasi dari rumah sakit Aisyiah perlu mengusahakan pengendalian persediaan obat-obatan yang telah kadar luasa sehingga potensi kerugian dapat terminimalisir. Sebagaimana yang diketahui, pengendalian internal pengadaan obat-obatan di rumah sakit sangat penting untuk memastikan ketersediaan obat-obatan yang cukup dan penggunaannya sesuai dengan rencana. Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis menjalankan penelitian dengan judul **"ANALISIS AKTIVITAS PENGENDALIAAN INTERNAL PENGADAAN OBAT – OBATAN PADA RUMAH SAKIT AISYIYAH KOTA PARIAMAN"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Apakah aktivitas pengendalian internal pada pengadaan obat-obatan pada Rumah Sakit Aisyiyah Kota Pariaman sudah memenuhi kriteria?
2. Apa saja masalah dan tantangan yang selama ini dihadapi pada aktivitas pengendalian internal pada pengadaan obat-obatan di rumah sakit Aisyiyah Kota Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah aktivitas pengendalian internal pada pengadaan obat-obatan pada Rumah Sakit Aisyiyah Kota Pariaman sudah memenuhi kriteria.
2. Untuk mengetahui masalah dan tantangan yang selama ini dihadapi pada aktivitas pengendalian internal pada pengadaan obat-obatan di rumah sakit Aisyiyah Kota Pariaman

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
 - a. Memperluas wawasan pengetahuan serta ketrampilan yang relevan dengan upaya peningkatan kompetensi dan kecerdasan.
 - b. Memberi kesempatan penerapan pengetahuan teoritis yang ada dari pendidikan dalam kasus nyata di perusahaan atau instansi terkait, khususnya mengenai sistem informasi akuntansi upaya pengadaan obat-obatan secara efektif dan efisien.
2. Bagi Rumah Sakit

- a. Memperluas wawasan dan tenaga dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan atau lembaga instansi
- b. Hasil penelitian yang ada dapat digunakan untuk mempertimbangkan serta menjadi masukan terkait sistem informasi akuntansi penyediaan obat-obatan pada instansi atau perusahaan.

3. Bagi Pembaca

Memberikan manfaat sebagai bahan pembandingan dan memberikan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tahap-tahapan yang dilakukan dalam penulisan suatu penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi kedalam lima bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian-uraian latarbelakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisikan dari penjelasan teori-teori yang mendukung penelitian yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas dan menjelaskan tentang desain penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil pembahasan penelitian.

BAB PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, dan Saran.



